Kuliah 3 & 4

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mengerti berbagai bentuk kebijakan dan teori-teori pembentukan kebijakan

Bentuk-bentuk kebijakan

Pokok Bahasan Teori Penting Kebijakan

Teori kelembagaan & Teori kelompok

Teori elit & Teori rasional

Teori inkremental & Teori permainan

Teori kebijakan yang lainnya

Bentuk kebijakan:

- **Bentuk “regulatory” mengatur perilaku orang, misalnya mewajibkan orang untuk memakai masker, larangan berdagang di jalur pejalan kaki**
- **Bentuk “redistributif” yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, contohnya pajak**
- **Bentuk “distributive” yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, contohnya subsidi pupuk, subsidi BBM, raskin (beras untuk keluarga tidak mampu)**
- **Bentuk “constituent” yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Kebijakan ini menjelaskan apa yang tidak ada dalam tiga kebijakan sebelumnya, yaitu pembentukan atau pembubaran badan/ lembaga, urusan luar negeri, dan juga bidang administrasi negara. Contoh: perjanjian internasional antar negara di bidang keamanan, pendidikan, ekonomi.**

Contoh Jenis Keputusan Kebijakan Pembangunan Pariwisata

- Merancang kerangka legal di bidang visa, perundang-undangan ketenagakerjaan, investasi asing, perlindungan konsumen, perencanaan regulasi dan bangunan;
- Menyediakan prasarana transportasi nasional dan regional, terutama pembangunan lapangan udara dan pelabuhan laut;
- Menyediakan prasarana umum dan pelayanan pendukung, seperti; fasilitas air, listrik, telekomunikasi dan pelayanan darurat;
- Menyediakan insentif fiskal dan keuangan, termasuk penghapusan pajak, penetapan tarif energi khusus, bantuan hibah, pinjaman lunak;
- Melaksanakan pengamatan pasar dan kegiatan promosi, seperti; melakukan analisis statistik terhadap kinerja industri pariwisata, bantuan teknis, melalui kegiatan pelatihan dan koordinasi usaha pemasaran bersama.

Bagi negara yang memilki ketergantungan terhadap sektor pariwisata sangat tinggi atau kegiatan pariwisata merupakan salah satu tumpuan ekonominya, maka dukungan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata sangat besar.

Hal ini tercermin dari adanya berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang mendukung terwujudnya elemen-elemen utama dan penunjang kegiatan pariwisata yang semakin lengkap, beragam dan berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar wisata.

- **Kebijakan pariwisata berkaitan dengan arahan dan keputusan yang dirancang untuk membantu tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah pusat dan daerah di bidang pariwisata.**
- **Pemerintah pusat dan daerah merancang kebijakan pariwisatanya didasarkan persfektif bisnis dan kebutuhan masyarakat**

BERBAGAI TEORI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

TEORI KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL)

Model ini memberikan pemahaman bahwa membuat **kebijakan publik merupakan tugas pemerintah**

Menurut Dye (dalam Nugroho 2009), ada tiga hal yang membenarkan pendekatan tersebut, yaitu (1) pemerintah **memiliki wewenang** membuat kebijakan publik, (2) fungsi tersebut **bersifat universal**, dan (3) pemerintah **memonopoli fungsi pemaksaan** dalam kehidupan publik.

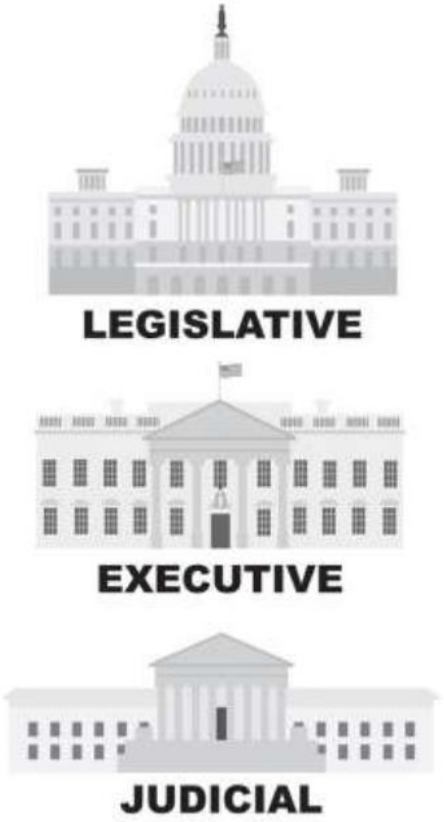

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Kebijakan publik **menjadi ajang dan cerminan perebutan kepentingan** dari **kelompok-kelompok yang dominan**

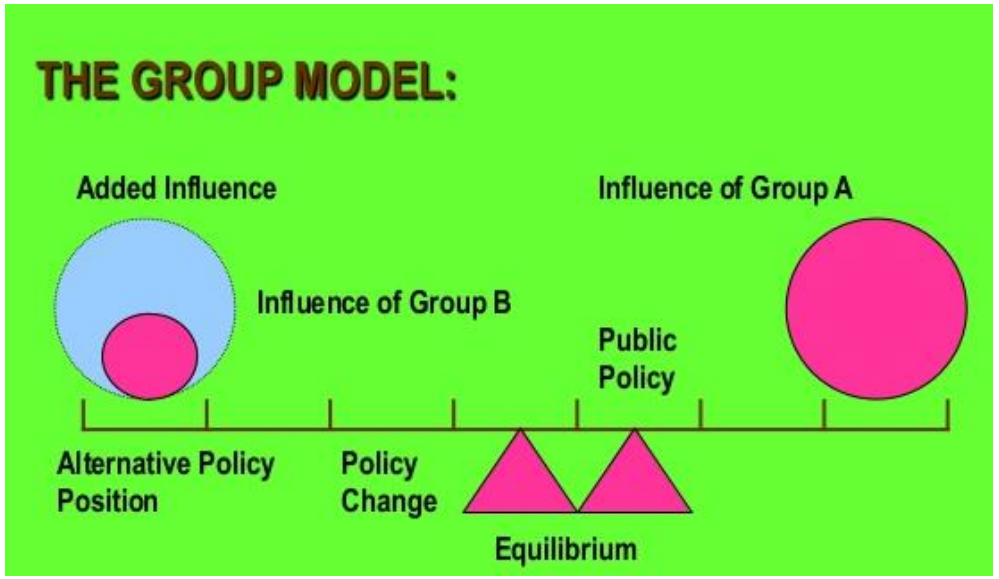

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Teori Kelompok

Peran sistem politik adalah untuk melakukan manajemen konflik yang muncul dari **adanya perbedaan tuntutan**, melalui cara sebagai berikut:

- Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan
- Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan
- Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan publik
- Memperkuat kompromi-kompromi tersebut

Contoh Teori Kelompok

- Kebijakan untuk memberikan hak istimewa kepada provinsi tertentu: Aceh, Papua, Yogyakarta
- Kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu Legislatif

Contoh Teori Kelompok dalam usulan Kemenparekraf untuk bebas visa kunjungan bagi 20 negara

“Kemenparekraf mengajukan 20 negara dengan (jumlah) wisatawan mancanegara tertinggi, di luar negara luar bebas visa kunjungan,” kata Sandi setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Sebanyak 20 negara itu yaitu Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar, Uni Ermirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Dua negara lainnya, Sandi menyebutkan merupakan negara dari Timur Tengah.

“Yang merupakan 20 teratas penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia, termasuk juga beberapa negara Timur Tengah, yang berkaitan dengan investasi,” ujar Sandi.

Teori Elite

- Berkembang dari teori elite-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu **pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa.**
- Elite secara Top-Down membuat kebijakan publik diimplementasikan oleh administrator publik kepada rakyat – atau massa

Teori Elite

Terdapat dua penilaian dalam kebijakan ini :

- Negatif : Pada akhirnya **dalam sistem politik, pemegang kekuasaan politiklah yang menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan keinginannya**. Rakyat dianggap sebagai kelompok yang sengaja dimanupulasi sedemikian rupa agar tidak masuk dalam proses formulasi kebijakan
- Positif : Seorang elite yang menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan **membawa negara – bangsa ke kondisi yang lebih baik dibanding pesaingnya**

Teori Elite

Setiap **elite politik ingin mempertahankan** status quo (ketetapan yang sudah ada), maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elite politik **tidak selalu** mementingkan kesejahteraan masyarakat

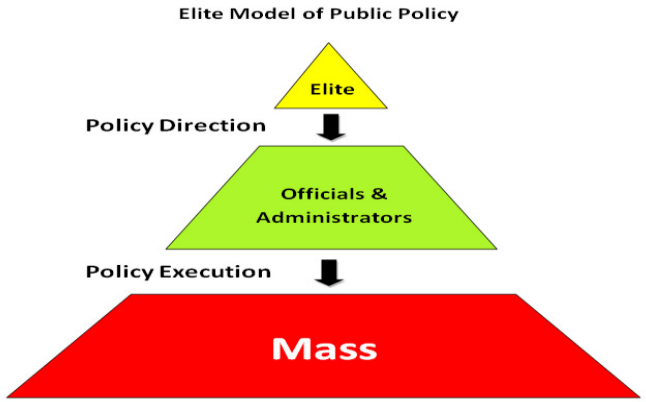

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Contoh Teori Elit

- Kebijakan untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kebijakan privatisasi BUMN, misalnya menjual BUMN Indosat kepada Ooredoo.

Teori Rasional

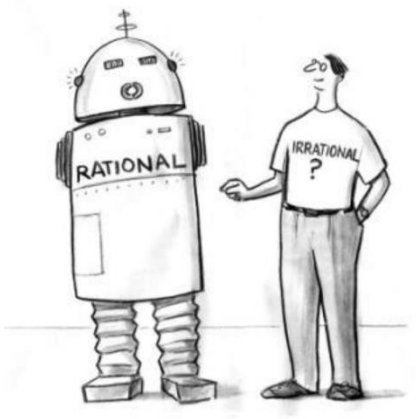

- Kebijakan publik sebagai *maximum social gain,* yang berarti pemerintah sebagai pembuat **kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum** bagi masyarakat
- Model ini yang paling banyak diikuti dalam praktik formulasi kebijakan publik di seluruh dunia
- Formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitas-nya. **Rasional yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai**.
- Lebih menekankan pada aspek efisiensi dan ekonomis

Teori Rasional

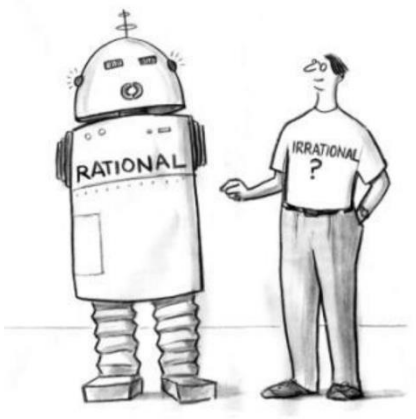

Formulasi kebijakan disusun dalam urutan berikut :

1. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
2. Menemukan pilihan-pilihan
3. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan
4. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

Kelemahannya adalah pada konsep maximum social gain yang berbeda-beda di antara kelompok kepentingan

Teori Inkremental

Merupakan kritik dari model rasional, karena untuk melakukan sesuai proses yang disyaratkan oleh model rasional memerlukan waktu, intelektual, dan biaya

Kebijkan model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan **variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan masa lalu**

Merupakan model kebijakan yang pragmatis / praktis

Kebijakan ini dibuat dibuat karena karena keterbatasan sumberdaya, dan juga bisa dibuat karena keberhasilan dimasa lalu yang menciptakan rasa puas diri yang berkepanjangan (complacent)

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Teori Inkremental

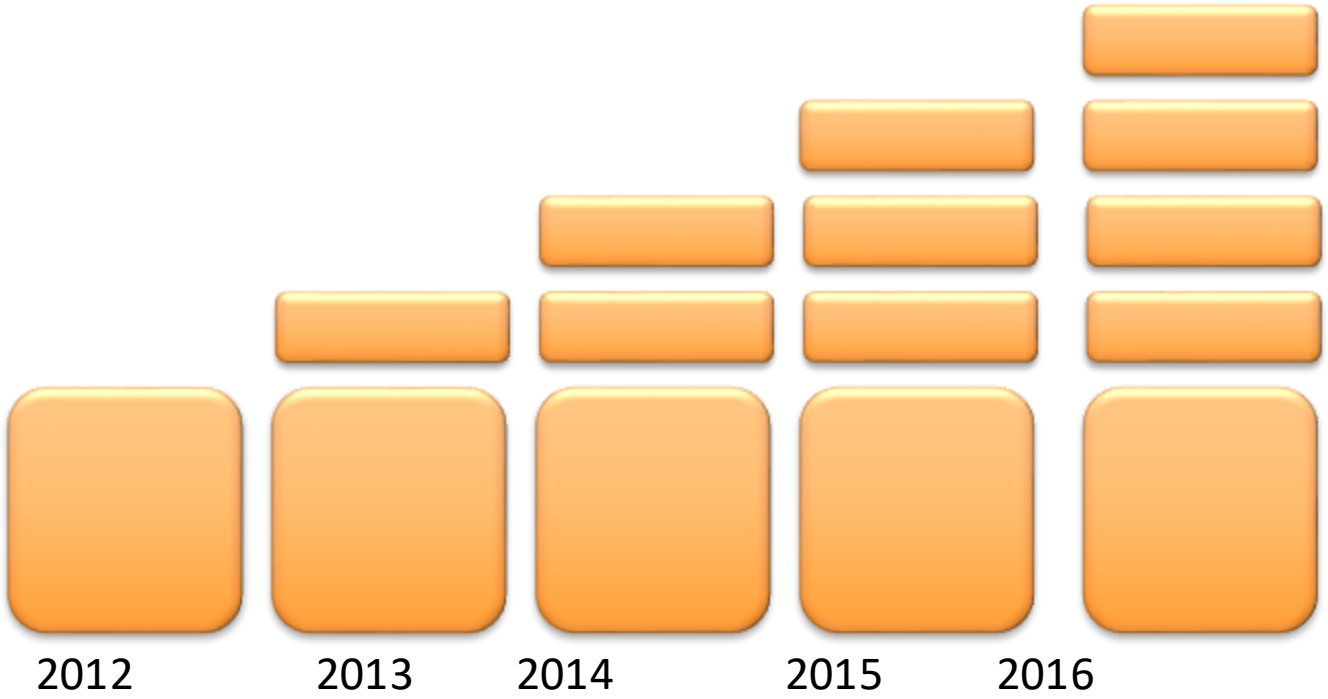

Kebijakan Inkrementalis

Komitmen-Komitmen
Kebijakan masa lalu

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Teori Permainan

Tingkat keberhasilan **kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aktor pembuat kebijakan, n**amun juga aktor-aktor lain

Konsep kuncinya adalah strategi yang paling aman dari serangan lawan, bukan yang optimum

Model ini bisa memiliki tingkat konservativitas yang tinggi, sehingga bisa **dikatakan strategi defensif**

Model ini bisa dikembangan menjadi **model yang ofensif apabila aktor berada dalam posisi superior**

Taylor Swift: Singapore prime minister defends deal to secure exclusive access to Eras tour

Prime minister Lee Hsien Loong confirmed an 'arrangement' for Singapore to be the only stop on Swift's south-east Asia Eras tour

- Pada Teori Permainan, pembuat kebijakan juga mempertimbangkan kebijakan yang dibuat oleh pihak lain

Halal dim sum, airport prayer rooms: how Hong Kong, Japan and Korea won over Muslim travellers

- After diplomatic spats with China, Japan and South Korea turned towards courting Muslim travellers
- Hong Kong’s array of halal food allows some of its most famous dishes to be enjoyed while sticking to Islamic principles

Teori Deliberatif (Teori Kebijakan Lainnya)

Model ini dikenal juga dengan nama model **"jejaring", "kolaboratif", "argumentatif'**

Medel ini adalah model untuk formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi **ruang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah** sebelum mengambil keputusan

Teori Deliberatif (Teori Kebijakan Lainnya)

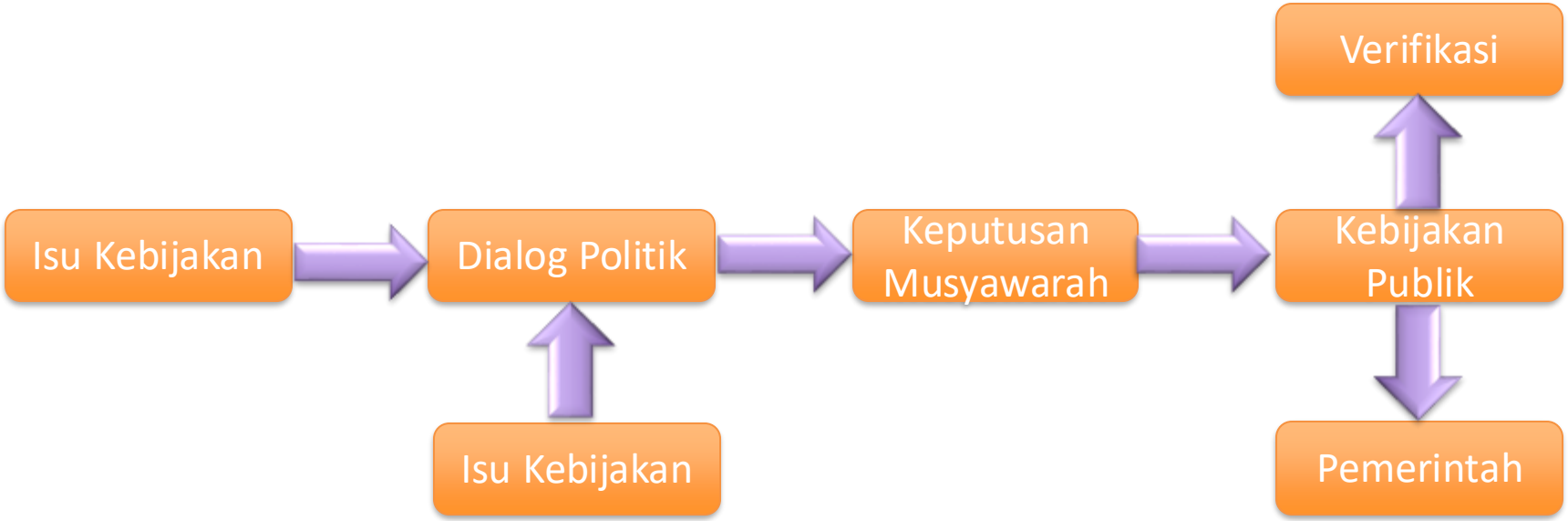

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Teori Demokratis (Teori Kebijakan Lainnya)

Biasanya di kaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintah yang **mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan para konstituen**

Model ini sangat efektif dalam implementasinya karena **setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan** dan setiap pihak bertanggungjawab atas kebijakan yang dirumuskan

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholder

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo